

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505985-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601851-31012023154838

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprisedana@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 15:48:38



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nomor : UB/II/23032/BSM/Skr

Ubud, 01 Pebruari 2023

Kepada Yth,
Sekretariat DPP Perbarindo
Jl. A. Yani Komp. Patra II No. 46,
Cempaka Putih – Jakarta Pusat
Di –
Jakarta

Perihal : Laporan Tata Kelola BPR

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola tahun 2022 PT
BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih

Hormat kami



Gde Komang Adiwangsa
Direktur

Persetujuan

LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI TAIJUN
2022

DIREKSI



GDE KOMANG ADIWANGSA

MENYETUJUI
DEWAN KOMISARIS



I MADE SUMATRA, SE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : Jl. Raya Peliatan No. 2 Ubud - Gianyar
Nomor Telepon : 0361975672
Penjelasan Umum : penerapan tata kelola yang dilaksanakan di BPR masih banyak yang harus disempurnakan untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan tata kelola tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|--|----------------------|--|---|
| 1 | Gde Komang Adiwangsa | Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | jabatan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan; |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris | | | |
| direktur utama mengundurkan diri karena meninggal dunia per tanggal 21 pebruari 2022 | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) | | | |
| pemenuhan pengurus BPR masih dalam proses ke OJK | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | I Made Sumatra | Komisaris Utama | Komisaris Utama |
| Rekomendasi Kepada Direksi | | | |
| Komisaris sudah mengundurkan diri per tanggal 27 Desember 2021, karena tidak bersertifikasi | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan) | | | |
| penggantian komisaris masih dalam proses ke OJK | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota direksi yang memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota direksi yang memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Gde Komang Adiwangsa | 0 | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keuangan baik dengan direksi ataupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Gde Komang Adiwangsa | 0 | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain ataupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota dewan komisaris yang memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | | | |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota dewan komisaris yang memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | I Made Sumatra | 0 | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota komisaris yang memiliki hubungan keuangan baik dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi ataupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | I Made Sumatra | 0 | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi ataupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 1 | 122564838 | 1 | 70512728 |
| 2 | Tunjangan | 1 | 56085249 | 1 | 35781005 |
| 3 | Tantiem | 1 | 10700000 | 1 | 5500000 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | 189350087 | | 111793733 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|----|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | 0 | 0 |
| 2 | Transportasi | 1 unit Mobil Dinas Pribadi | 0 |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 0 | 0 |
| 4 | Fasilitas lainnya | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Keterangan | Perbandingan | |
|----|--|--------------|---|
| | | (a/b) | 1 |
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 3,07 | 1 |
| 2 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,33 | 1 |
| 3 | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,57 | 1 |
| 4 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,52 | 1 |
| 5 | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) | 2,98 | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|---|
| 1 | 21-04-2022 | 2 | kinerja triwulan I/2022, penyelesaian NPL, APU PPT |
| 2 | 09-05-2022 | 5 | penyelesaian NPL, likuiditas BPR, persiapan RUPS th 2021 |
| 3 | 20-07-2022 | 2 | kinerja triwulan II/2022, penyelesaian NPL |
| 4 | 06-10-2022 | 5 | tindak lanjut audit OJK, APU PPT, likuiditas BPR, persiapan odalan kantor |
| 5 | 14-10-2022 | 2 | kinerja triwulan II/2022, penyelesaian NPL, permodalan, likuiditas BPR, tindak lanjut audit OJK |
| 6 | 11-11-2022 | 16 | kinerja BPR, pengembangan produk kredit KTA, likuiditas BPR |
| 7 | 07-12-2022 | 4 | persiapan audit KAP, RBB 2023, modal inti |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | I Made Sumatra | 6 | 0 | 85,71 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

kehadiran dewan komisaris melalui telekonferensi melalui video call whatsapp

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | I Made Sumatra | 6 | 0 | 85,71 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

kehadiran dewan komisaris melalui telekonferensi melalui video call whatsapp

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ditemukan penyimpangan internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|--|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama tahun 2022 tidak ada masalah hukum yang dihadapi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ditemukan adanya benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama BPR | : | PT. BPR Mitra Bali Sriedana Mandiri |
| Posisi Laporan | : | 31-12-2022 |
| Alamat | : | JL. RAYA PELIATAN NO. 2 UBUD - GIANYAR, BALI |
| Nomor Telepon | : | (0361)-975672 |
| Modal Inti BPR | : | 7.242.490.758,00 |
| Total Aset BPR | : | 29.640.501.256,00 |
| Bobot BPR | : | B |
| Status Audit Ekstern | : | Diaudit |
| Nilai Komposit | : | 1,3 |
| Peringkat Komposit | : | 1 |
| Analisis | : | Dari hasil self assesment bpr ada dalam kategori sangat baik. Walaupun sudah dalam kategori sangat baik masih banyak yang harus diperbaiki untuk memaksimalkan pelaksanaan tata kelola bpr. Di tahun 2023 bpr diharapkan memenuhi kekosongan di anggota direksi dan anggota dewan komisaris |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Sriedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 0,75 | 0,40 | 0,10 | 1,25 | 0.250 | Kesimpulan |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,84 | 0,40 | 0,10 | 1,34 | 0.201 | Kesimpulan |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | Kesimpulan |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100 | 1,00 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0.150 | Kesimpulan |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0,100 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0.100 | Kesimpulan |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 0,60 | 0,50 | 0,13 | 1,23 | 0.123 | Kesimpulan |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0.025 | Kesimpulan |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100 | 0,50 | 0,52 | 0,10 | 1,12 | 0.112 | Kesimpulan |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075 | 1,00 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0.113 | Kesimpulan |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 1,40 | 0.105 | Kesimpulan |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0.075 | Kesimpulan |
| Nilai Komposit | | | | | | 1.3 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Sangat Baik | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|----------------------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 3 | direksi hanya 1 |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 2 | direksi tinggal di tabanan |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 1 | Keterangan |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1 | Keterangan |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,50 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,75 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 1 | Keterangan |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 1 | Keterangan |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1 | Keterangan |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | Keterangan |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 1 | Keterangan |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 1 | Keterangan |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 1 | Keterangan |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 1 | Keterangan |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 1 | Keterangan |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 1 | Keterangan |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|-------------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 3 | komisaris hanya 1 |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 1 | Keterangan |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 3 | Keterangan |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1 | Keterangan |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Keterangan |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 1 | Keterangan |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 2 | Keterangan |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 1 | Keterangan |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------|
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 15 | |
| | Rata-rata | 1,67 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,84 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 1 | Keterangan |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 1 | Keterangan |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1 | Keterangan |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 1 | Keterangan |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1 | Keterangan |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 1 | Keterangan |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | Keterangan |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | Keterangan |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 2 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1 | Keterangan |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 1 | Keterangan |
| 3 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> | 1 | Keterangan |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 1 | Keterangan |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 1 | Keterangan |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 1 | Keterangan |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 1 | Keterangan |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 1 | Keterangan |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 1 | Keterangan |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | Keterangan |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 1 | Keterangan |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 1 | Keterangan |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 2 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 6 | |
| | Rata-rata | 1,20 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,60 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 1 | Keterangan |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Keterangan |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 1 | Keterangan |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,25 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,50 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 1 | Keterangan |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 1,25 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,13 | |

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 1 | Keterangan |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 1 | Keterangan |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 1 | Keterangan |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p> | 1 | Keterangan |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 5 | Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 1 | Keterangan |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 2 | Keterangan |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 1 | Keterangan |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 1 | Keterangan |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 2 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 1,29 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,52 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 1 | Keterangan |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 1 | Keterangan |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | 1 | Keterangan |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 5 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 5 | |
| | Rata-rata | 5,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,50 | |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|-----------------|------------|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 1 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,40 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Keterangan |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 1 | Keterangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,10 | |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

A. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri periode Desember 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1.21 dengan prediksi Sangat Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

| No | Aspek yang Dinilai | Bobot | Peringkat | Nilai |
|----|---|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris | 15.00% | 1.33 | 0.20 |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20.00% | 1.25 | 0.25 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 00.00% | 0 | - |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10.00% | 1.9 | 0.19 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 10.00% | 1.11 | 0.11 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 10.00% | 1.23 | 0.12 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 2.50% | 1.00 | 0.03 |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern | 10.00% | 1.21 | 0.12 |
| 9 | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) | 7.50% | 1.50 | 0.11 |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal | 7.50% | 1.00 | 0.08 |
| 11 | Rencana Strategis Bank | 7.50% | 1.00 | 0.08 |
| | Nilai Komposit | 100.00% | | 1.28 |
| | Prediksi Komposit | | | Sangat Baik |

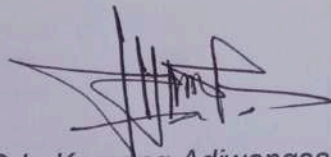
c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Mitra Bali Sriedana Mandiri tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

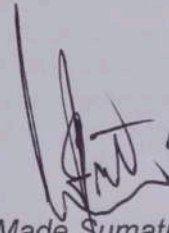
Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance* PT. BPR Mitra Bali Sriedana Mandiri. tahun buku 31 Desember 2022.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPR Mitra Bali Sriedana Mandiri



Gde Komang Adiwangsa
Direktur



I Made Sumatra
Komisaris Utama

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2022
PT. BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri**

| NO | Aspek Yang Dinilai | Bobot (a) | Peringkat (b) | Nilai (a) + (b) | Catatan |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-----------------|---|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris | 10.00% | 2 | 0.20 | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20.00% | 2 | 0.25 | Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 10.00% | 3 | - | Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan secara efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada dewan Direksi atas perkembangan usaha bank |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10.00% | 2 | 0.19 | Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa Direksi yang tidak menjabat lagi, dapat menjadi Pegawai di Bank ybs, sedang dilakukan proses perubahan. |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 5.00% | 2 | 0.11 | Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan [engujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 5.00% | 2 | 0.12 | Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 5.00% | 2 | 0.03 | Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern | 7.50% | 3 | 0.12 | Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai |
| 9 | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) | 7.50% | 2 | 0.11 | Tidak terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besarsedang dalam penyempurnaan |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal | 15.00% | 3 | 0.08 | Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank. |
| 11 | Rencana Strategis Bank | 5.00% | 3 | 0.08 | Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan letentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisniscukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank |
| Nilai Komposit | | 100.00% | | 1.28 | Sangat Baik |

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
|------------------------|-------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Total Penilaian Faktor | 0,25 | 0,20 | - | 0,19 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 1,28 |
| Predikat Komposit | Sangat Baik | | | | | | | | | | | |

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

(2)

A